

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z

Chelsy Wandellice¹, Ellyn Auria², Felice Yang³, Jaiden Ananta Halim⁴, Jennifer Liyanto⁵, Sherly Winarlie⁶, Aryusmar⁷, Markus Kurniawan⁸

chelsy.wandellice@binus.ac.id¹, ellyn.auria@binus.ac.id², felice.yang@binus.ac.id³,
jaiden.halim@binus.ac.id⁴, jennifer.liyanto@binus.ac.id⁵, sherly.winarlie@binus.ac.id⁶,
aryusmar@binus.ac.id⁷, markus.kurniawan@binus.ac.id⁸

Binus University

ABSTRAK

Perkembangan media sosial yang sangat pesat di era digital telah mengubah pola partisipasi politik, khususnya di kalangan Generasi Z yang dikenal sebagai generasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap keterlibatan politik Gen Z di Indonesia. Fokus penelitian meliputi intensitas konsumsi berita politik melalui platform digital, bentuk-bentuk partisipasi politik yang muncul, serta faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi keterlibatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner berbasis Google Form dengan skala Likert, yang disebarakan kepada 35 responden Gen Z berusia 17-28 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang informasi dan interaksi politik, sekaligus menyoroti risiko seperti misinformasi, polarisasi, dan slacktivism yang dapat memengaruhi kualitas partisipasi. Temuan penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian SDG 16 dengan mendorong literasi digital, memperkuat partisipasi politik yang kritis, serta mendukung pengembangan strategi komunikasi politik yang lebih efektif bagi generasi muda.

Kata Kunci: Generasi Z, Media Sosial, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

The rapid development of social media in the digital era has significantly transformed patterns of political participation, particularly among Generation Z, who are known as digital natives. This study aims to examine the influence of social media on the political engagement of Gen Z in Indonesia. The research focuses on the intensity of political news consumption through digital platforms, the forms of political participation that emerge, and the supporting or inhibiting factors that shape such engagement. The study employs a questionnaire-based method using a Likert-scale Google Form distributed to 35 Gen Z respondents aged 17-28 who actively use social media. The expected outcome is a comprehensive overview of how social media functions as a space for political information and interaction, while also highlighting risks such as misinformation, polarization, and slacktivism that may affect the quality of participation. The findings of this study are expected to contribute to the achievement of SDG 16 by promoting digital literacy, strengthening critical political participation, and supporting the development of more effective political communication strategies for younger generations.

Keywords: Generation Z, Social Media, Political Participation.

PENDAHULUAN

Tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) ke-16 menekankan pentingnya pembangunan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif sebagai fondasi utama bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Poin penting dari SDGs 16 mencakup penguatan lembaga yang transparan dan akuntabel, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. (United Nations, n.d.)

Partisipasi politik di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dapat menimbulkan siklus apatisme yang merugikan kualitas demokrasi. Fenomena golongan putih di Indonesia kerap muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap partai politik maupun figur pemimpin (Natalia et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan perasaan bahwa suara individu tidak lagi bermakna.

Partisipasi politik seperti pemilu atau kampanye, pada dasarnya merupakan salah satu indikator kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan adanya kesadaran, keterlibatan, dan apresiasi masyarakat terhadap proses kenegaraan. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi mencerminkan minimnya kepedulian publik terhadap isu politik maupun pemerintahan. (Natalia et al., 2025)

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap pola partisipasi politik, terutama melalui media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube kini menjadi ruang utama bagi generasi muda untuk berinteraksi dengan isu politik, baik melalui diskusi, penyampaian aspirasi, maupun partisipasi dalam kampanye dan mobilisasi massa. (Bajari & Morin, 2025)

Generasi Z atau Gen Z (kelahiran 1997–2012), dengan karakteristik sebagai digital native, tercatat sebagai salah satu kelompok dominan dalam dinamika politik Indonesia. Pada pemilu 2024, Gen Z berkontribusi sekitar 22,85% (sebanyak 46.800.161) pemilih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebesar 79,5% diantaranya aktif menggunakan media sosial (Natalia et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi arah politik nasional.

Gen Z menyuarakan aspirasi politik tidak terbatas di ruang fisik, tetapi juga melalui ruang digital melalui konten kreatif seperti meme, video singkat, satir politik, dan unggahan estetik. Contoh konkret partisipasi Gen Z dapat dilihat pada aksi “17+8”. Dalam aksi ini Gen Z menyoroti berbagai isu, mulai dari kekecewaan terhadap kebijakan DPR, transparansi pemerintahan, hingga tuntutan perbaikan sistem politik yang lebih inklusif dan akuntabel (Dianira F., 2025). Ajakan untuk aktif menyuarakan keresahan terhadap situasi politik ramai disebar di media sosial dan melibatkan influencer untuk memperluas jangkauan pesan politik.

Namun, perlu dicatat bahwa partisipasi digital sering kali bersifat simbolis sehingga tidak selalu berbanding lurus dengan aksi nyata di lapangan. Fenomena slacktivism (aktivisme ringan dan bersifat simbolis), risiko polarisasi opini, penyebaran misinformasi, dan disinformasi masih kerap terjadi di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial, selain berperan dalam mempermudah penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran politik, juga membawa tantangan terhadap kualitas partisipasi politik generasi muda (Bajari & Morin, 2025). Oleh karena itu, fenomena ini penting untuk dikaji secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konten digital memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Studi oleh Bajari dan Morin (2025) menemukan bahwa aktivisme di media sosial mampu membentuk sikap politik melalui penyebaran informasi, ajakan, dan ekspresi opini publik. Konten digital seperti kampanye politik, narasi sosial, serta wacana publik terbukti mendorong pengguna untuk terlibat dalam tindakan politik, mulai dari mengomentari isu hingga mengikuti diskusi daring.

Temuan ini sejalan dengan studi oleh Deviana Agustin (2025) yang menegaskan bahwa komunikasi politik melalui media sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Media sosial membantu anak muda mendapatkan informasi politik, berdiskusi, dan mengekspresikan pandangan secara lebih mudah. Konten digital seperti kampanye, edukasi isu, dan percakapan publik mendorong mereka untuk lebih tertarik dan terlibat dalam proses

politik, meskipun tetap diperlukan literasi media agar pemilih pemula mampu memilah informasi yang mereka terima dan terhindar dari misinformasi.

Selain itu, penelitian oleh Arsyad, dkk (2024) membahas bagaimana media sosial menjadi agen penting dalam transformasi komunikasi politik. Melalui kajian literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar platform penyebaran informasi, tetapi juga arena pembentukan opini publik yang dipengaruhi oleh interaksi dua arah antara politisi dan masyarakat, serta oleh algoritma yang menentukan visibilitas konten. Kajian tersebut menegaskan pentingnya memahami teori komunikasi seperti Agenda Setting, Gatekeeping, dan Uses and Gratifications untuk mempelajari kompleksitas perubahan politik di era digital. Hasilnya menekankan bahwa aktor politik harus mampu memahami dinamika media sosial agar dapat memaksimalkan dampak positif serta meminimalkan risiko dalam proses komunikasi politik modern.

Namun, hasil penelitian-penelitian tersebut masih berada pada konteks umum dan belum mengkaji secara spesifik bagaimana pengaruh media sosial bekerja pada kelompok tertentu, khususnya Gen Z yang merupakan pengguna media sosial paling aktif dan memiliki karakteristik perilaku politik yang berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum mengkaji antusiasme Gen Z untuk terlibat dalam diskusi politik di media sosial. Kekosongan inilah yang menunjukkan bahwa terdapat sebuah research gap utama, dengan belum adanya kajian terarah mengenai bentuk dan kualitas partisipasi politik Gen Z dalam ruang digital.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana Gen Z berinteraksi dengan konten politik di media sosial. Penelitian berfokus pada tingkat intensitas Gen Z dalam mengonsumsi konten politik, pengaruh media sosial terhadap pola keterlibatan politik mereka, serta berbagai faktor yang dapat mendorong atau menghambat partisipasi politik generasi ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur intensitas konsumsi berita politik Generasi Z melalui media sosial, menganalisis tingkat kepedulian mereka terhadap isu-isu politik Indonesia sebagaimana tercermin dari aktivitas pencarian dan akses berita politik di berbagai platform digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keterlibatan politik Gen Z dalam ruang media sosial.

Penelitian ini juga berkontribusi pada pencapaian beberapa aspek BGA Character Building, di antaranya adalah Global Standard Technical Competencies, tercermin dari penerapan teori politik, komunikasi, dan metode ilmiah secara akademis, Digital and Technology Fluency, dimana penelitian berkaitan erat dengan penggunaan dan interpretasi informasi digital, Critical and Creative Thinking, yang diperlukan untuk proses analisis data, perbandingan teori, dan penafsiran hasil penelitian, Adaptability untuk menyesuaikan diri terhadap fenomena sosial yang terus berubah seiring waktu, dan Collaboration sebagai koordinasi kerja kelompok dalam proses pengerjaan penelitian, serta Social Awareness untuk memahami perilaku politik masyarakat, khususnya Generasi Z dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z menjadi relevan untuk memetakan pola perilaku politik generasi muda, sekaligus merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs 16, khususnya dalam memperkuat lembaga demokrasi yang transparan, inklusif, dan akuntabel, serta memastikan peran generasi muda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

KAJIAN TEORI

Berisi teori-teori yang relevan untuk menjelaskan variabel penelitian yang berhubungan dengan media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z.

1. Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi politik merupakan konsep dalam ilmu politik yang merujuk pada keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan politik. Menurut Samuel P. Huntington dan

Joan Nelson (dalam Arniti, 2025), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik sangat penting karena keputusan setiap individu dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi negara.

Partisipasi politik dikelompokkan menjadi bentuk partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional. Partisipasi konvensional umumnya merupakan partisipasi politik yang normal, mengikuti prosedur yang berlaku, dan tidak melibatkan kekerasan. Partisipasi konvensional dapat diwujudkan dengan pemilihan umum (pemilu), kegiatan kampanye, diskusi politik, atau bergabung menjadi anggota partai politik. Sedangkan partisipasi non konvensional biasanya dilakukan di luar prosedur yang wajar dan terkadang melibatkan kekerasan. Partisipasi non konvensional dapat diwujudkan dalam aksi seperti demonstrasi, boikot, ataupun mogok kerja (Suhardi, 2019).

Menurut Milbrath (dalam Suhardi, 2019), terdapat empat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Pertama, adanya perangsang. Orang ingin ikut dalam dunia politik karena tertarik dengan peranan, kesejahteraan, kekuasaan, atau keuntungan. Kedua, karakter pribadi. Seseorang yang punya kepedulian sosial tinggi atau sifat peduli terhadap masalah masyarakat biasanya lebih aktif dalam kegiatan politik, karena ada dorongan pengabdian. Ketiga, status sosial ekonomi. Orang yang berstatus ekonomi tinggi sering berpolitik untuk aktualisasi diri atau pengaruh, sedangkan yang ekonomi rendah biasanya berpolitik untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Keempat, situasi lingkungan politik. Situasi politik yang kondusif menjadikan orang merasa nyaman dalam melakukan kegiatan politik. Sebaliknya, situasi yang tidak kondusif membuat orang merasa ragu, meski kadang juga memicu keterlibatan untuk memperbaiki keadaan.

2. Media Sosial

Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang berperan penting dalam memengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya. Menurut Boyd dan Ellison (dalam Margareta, 2025) menyatakan bahwa media sosial memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semi-publik dalam suatu sistem, menjalin koneksi, serta mengakses jaringan koneksi orang lain. Pada era digital, media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X kini banyak dimanfaatkan generasi muda sebagai sarana berinteraksi sekaligus memperoleh informasi.

Media sosial memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai sarana memperoleh informasi yang cepat dan luas. Selain itu, media sosial juga menjadi ruang interaksi bagi para pengguna untuk saling memberikan opini. Media sosial juga berperan sebagai alat hiburan dengan menyediakan konten-konten yang menarik dan menghibur.

Secara keseluruhan, media sosial memberikan berbagai dampak positif. Kehadiran media sosial mempermudah komunikasi jarak jauh, mempercepat penyebaran informasi, menyediakan ruang untuk mengekspresikan kreativitas, serta membuka peluang kerja baru. Namun demikian, media sosial juga membawa dampak negatif yang perlu diwaspadai. Penyebaran informasi yang cepat dan luas berpotensi meningkatkan penyebaran informasi palsu, maraknya fenomena cyberbullying atau kekerasan digital, serta menurunnya kualitas komunikasi tatap muka secara langsung.

3. Generasi Z

Menurut ResearchGate (2023), Generasi Z merupakan kelompok yang lahir di 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi pertama yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital sejak usia muda dan sering disebut sebagai "Digital Natives". Menurut Nurlaila (2025), latar belakang ini membentuk mereka menjadi Generasi Digital, di mana batasan antara aktivitas fisik dan digital kabur, serta memiliki pola pikir mandiri dan *Do It Yourself* (DIY) dalam mencari informasi dan keterampilan.

Menurut Rosyidah & Haniifah (2025), penggunaan media sosial yang intensif memiliki korelasi positif dan signifikan dengan peningkatan tingkat kecemasan dan stres di kalangan Gen Z.

Tekanan dari media sosial, ditambah dengan ketidakpastian global dan tekanan karier, dapat menyebabkan kelebihan beban digital (*digital overload*). Amrullah (2025) juga menyatakan bahwa Gen Z menghadapi kesulitan psikologis yang intens, seperti risiko isolasi sosial meskipun menjadi generasi yang paling terhubung, serta rentan terhadap isu kesehatan mental akibat paparan konten negatif.

4. Pengaruh Media Sosial terhadap Politik

Menurut Achmad & Dwimawanti (2024) dan Jayawinangun & Nugroho (2025), media sosial kini menjadi pendorong utama bagi partisipasi politik, khususnya bagi Gen Z. Kajian menegaskan bahwa media sosial beralih fungsi dari hiburan menjadi arena publik interaktif tempat berdiskusi politik dan menyebarkan informasi. Achmad & Dwimawanti (2024) menemukan hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial dan peningkatan keterlibatan politik aktif. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berhasil membuat informasi politik lebih mudah diakses dan memfasilitasi komunikasi yang timbal balik dan non-hierarkis, jauh berbeda dari pola komunikasi politik tradisional.

Meskipun positif, menurut Khatimah (2024), media sosial menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Ancaman utamanya adalah penyebaran disinformasi (*hoaks*) yang sangat cepat dan munculnya polarisasi opini yang mempercepat keterpecahan ideologis. Karena didorong oleh algoritma, disinformasi ini sering kali menciptakan 'ruang gema' (*echo chamber*), yaitu tempat pengguna hanya melihat dan mendengar pandangan yang cocok dengan apa yang sudah mereka yakini. Situasi ini dapat merusak kualitas diskusi publik dan mengancam keadilan, sehingga dampak media sosial terhadap politik bersifat ambivalen.

Secara keseluruhan pengaruh media sosial terhadap politik adalah fenomena kompleks dan ambigu, menghasilkan dampak positif dan negatif secara bersamaan. Menurut Khatimah (2024), media sosial mengubah lanskap politik Indonesia dengan meningkatkan akses informasi, tetapi pada saat yang sama, ia menjadi media penyebar polarisasi. Ambiguitas ini menunjukkan bahwa media sosial pada dasarnya adalah alat yang netral. Oleh karena itu, efektivitas dan dampaknya, baik untuk mobilisasi demokrasi maupun untuk kepentingan manipulasi, sepenuhnya ditentukan oleh aktor dan lingkungan yang memanfaatkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat partisipasi politik Gen Z. Metode kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert yang dirancang untuk menggali informasi terkait frekuensi Gen Z dalam mengakses berita politik melalui media sosial, tingkat perhatian serta kepedulian mereka terhadap isu politik, serta faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat partisipasi politik melalui media sosial.

Kuesioner disusun dalam bentuk Google Form dan menggunakan skala Likert lima poin dengan rentang nilai 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner disebarkan secara daring melalui media sosial, khususnya WhatsApp, kepada 35 responden Gen Z berusia 17-28 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh media sosial terhadap tingkat partisipasi politik Gen Z.

HASIL DAN PEMBAHASAN

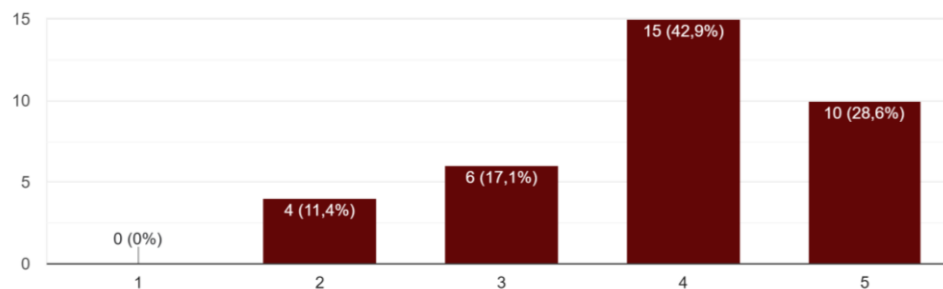
Melalui hasil kuesioner yang disebarkan kepada 35 responden Gen Z, maka didapatkan data sebagai berikut:

Jumlah Kuesioner yang Disebar	Jumlah Kuesioner yang Kembali	Jumlah Kuesioner yang Terjawab
35	35	35

Hasil Kuesioner

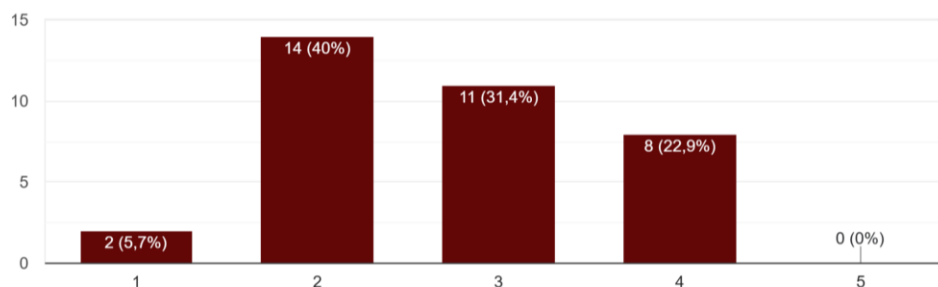
Berikut adalah hasil kuesioner yang telah diisi oleh 35 responden.

1. Seberapa besar intensitas konsumsi berita politik Gen Z melalui media sosial?



Grafik 1. Frekuensi Responden Melihat Konten Politik Indonesia di Media Sosial

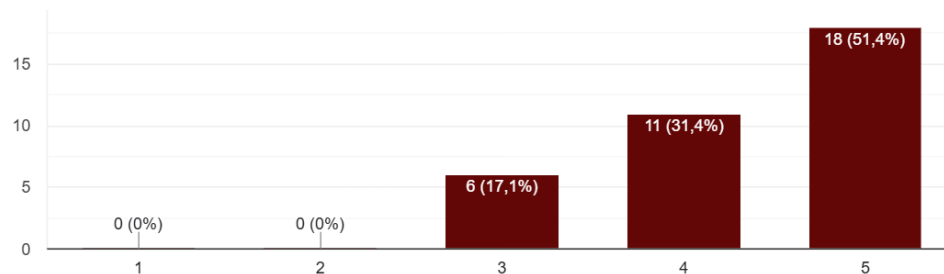
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang sangat tidak setuju (skor 1). Hanya 11,4% responden yang memberikan skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden merasa tidak sering melihat konten politik. Sebanyak 17,1% memilih skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi netral terhadap frekuensi paparan konten politik di media sosial. Di sisi lain, mayoritas responden memberikan skor 4 (42,9%) dan skor 5 (28,6%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengakui bahwa mereka memang sering melihat konten atau berita politik Indonesia di media sosial, baik pada tingkat setuju maupun sangat setuju.



Grafik 2. Frekuensi Responden Mengikuti Akun atau *Influencer* yang Sering Membahas Politik Indonesia

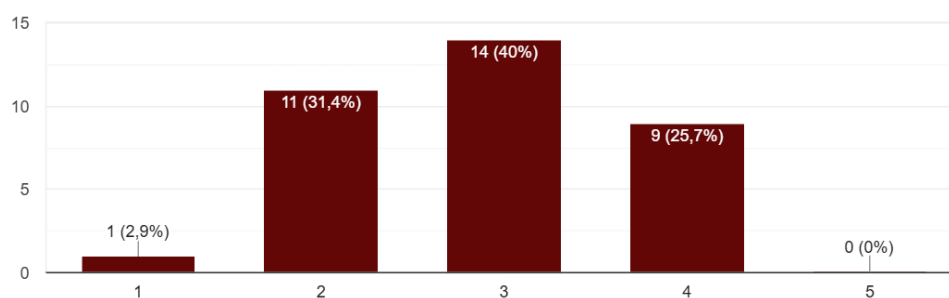
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian kecil responden (5,7%) memberikan skor 1. Sekitar 40% responden memberikan skor 2. Kedua hal tersebut menandakan bahwa sebagian responden merasa tidak mengikuti akun atau *influencer* yang sering membahas politik Indonesia. Sebanyak 31,4% memilih skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi netral. Di sisi lain, sebagian kecil responden memberikan skor 4

(22,9%) dan tidak ada yang memilih skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa, hanya sebagian kecil responden yang mengakui bahwa mereka mengikuti akun atau *influencer* yang sering membahas politik Indonesia.



Grafik 3. Frekuensi Responden yang Menjadikan Media Sosial Sebagai Sumber Utama Kondisi Politik Indonesia

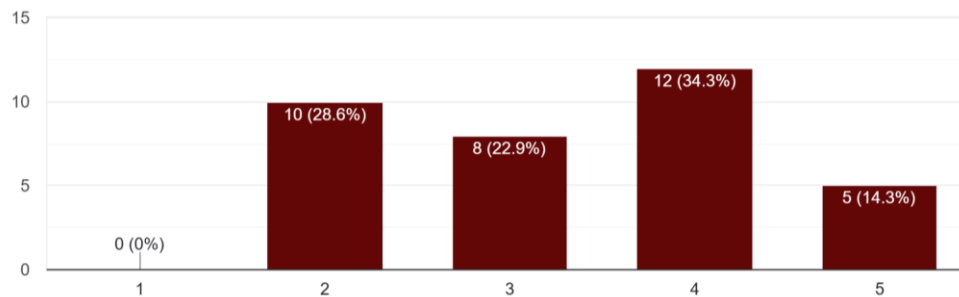
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memberikan skor 1 atau 2, sehingga tidak ada responden yang menganggap media sosial bukan sumber utama berita politik. Sebanyak 17,1% memilih skor 3. Hal ini menunjukkan posisi netral. Adapun 31,4% memilih skor 4 dan 51,4% memilih skor 5. Dengan demikian, mayoritas responden menjadikan media sosial sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi tentang politik Indonesia.



Grafik 4. Frekuensi Responden yang Menghabiskan Cukup Banyak Waktu untuk Membaca atau Menonton Konten Politik di Media Sosial

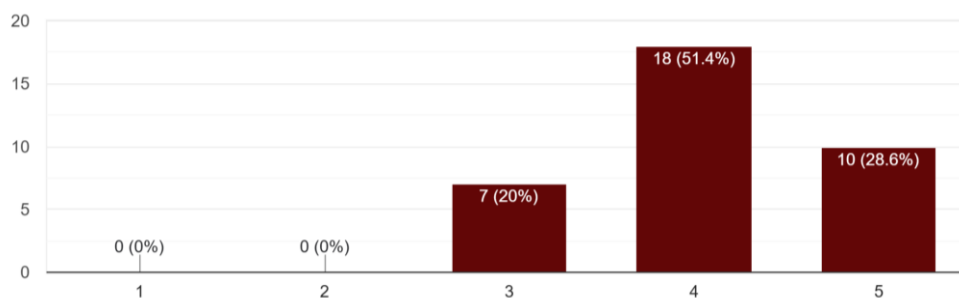
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 2,9% responden memilih skor 1 dan 31,4% memilih skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden tidak menghabiskan banyak waktu untuk membaca atau menonton konten politik di media sosial. Sebanyak 40% responden memberikan skor 3. Hal ini menunjukkan kecenderungan netral. Sementara itu, 25,7% memilih skor 4 dan tidak ada yang memilih skor 5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit responden yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk mengonsumsi konten politik melalui media sosial.

2. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap pola partisipasi politik Gen Z di Indonesia?



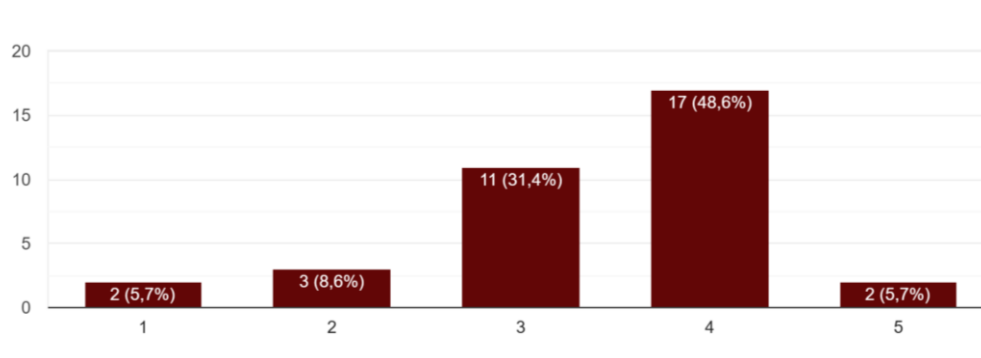
Grafik 5. Frekuensi Kesulitan Responden dalam Membedakan Informasi Politik yang Benar dan Hoaks di Media Sosial

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memberikan skor 1, sehingga tidak ada yang merasa sangat tidak kesulitan dalam membedakan informasi politik yang benar dan hoaks di media sosial. Sebanyak 28,6% responden memilih skor 2. Hal ini menunjukkan sebagian merasa tidak terlalu kesulitan. Sementara itu, 22,9% memilih skor 3. Hal ini menunjukkan posisi netral. Mayoritas responden memberikan skor 4 (34,3%), dengan tambahan 14,3% responden yang memberikan skor 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden merasa kesulitan dalam membedakan informasi politik yang valid dan hoaks di media sosial.



Grafik 6. Frekuensi Kebiasaan Responden dalam Memeriksa Kebenaran Berita Politik di Media Sosial

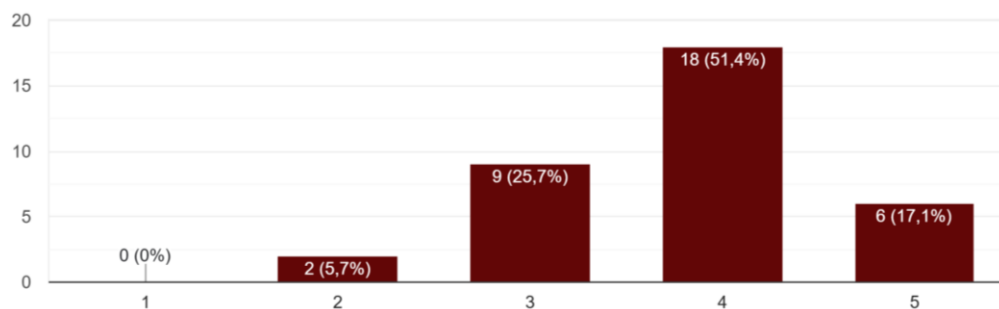
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memberikan skor 1 maupun skor 2. Hal ini menunjukkan tidak ada responden yang tidak setuju dengan kebiasaan memeriksa kebenaran berita politik sebelum mempercayainya. Sebanyak 20% responden memberikan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden berada pada posisi netral terhadap perilaku tersebut. Sebagian besar responden berada pada kategori setuju, yaitu sebanyak 51,4% memberikan skor 4 dan 28,6% memberikan skor 5. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memiliki kebiasaan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mempercayai informasi politik yang mereka temui di media sosial.



Grafik 7. Frekuensi Pengaruh Komentar Pengguna Lain di Media Sosial terhadap Penilaian Responden pada Isu Politik

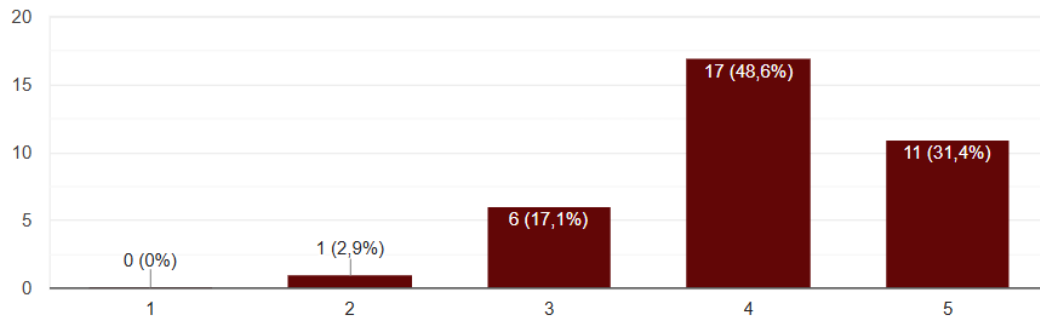
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian kecil responden, yaitu 5,7% sangat tidak setuju dan 8,6% tidak setuju bahwa komentar pengguna lain di media sosial memengaruhi penilaian mereka terhadap isu politik. Sebanyak 31,4% responden berada pada posisi netral. Sementara itu, mayoritas responden menunjukkan kecenderungan setuju, dengan 48,6% memberikan skor 4 dan 5,7% memberikan skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa pendapat atau komentar pengguna lain di media sosial turut membentuk cara mereka menilai isu politik.

3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat keterlibatan politik Gen Z melalui media sosial?



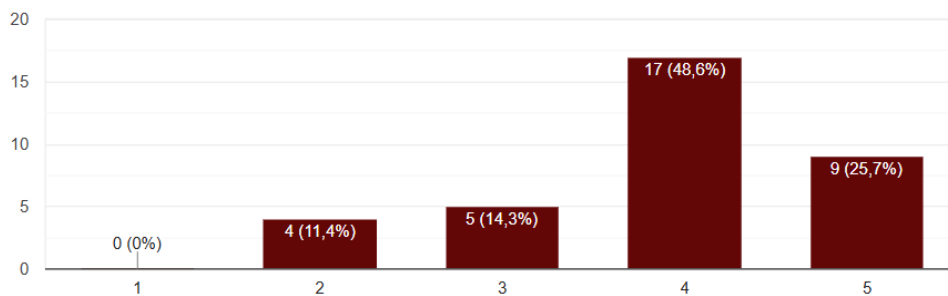
Grafik 8. Frekuensi Responden Merasa Perlu Memahami Isu-Isu Politik Agar Dapat Mengambil Keputusan yang Tepat

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memberikan skor 1. Sebagian kecil responden, yaitu 5,7% tidak setuju untuk perlu memahami isu-isu politik agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Sebanyak 25,7% responden merasa netral dengan memberikan skor 3. Sebagian besar responden (51,4%) memberikan skor 4 dan 17,1% memberikan skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa perlu untuk memahami isu-isu politik agar dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai warga negara.



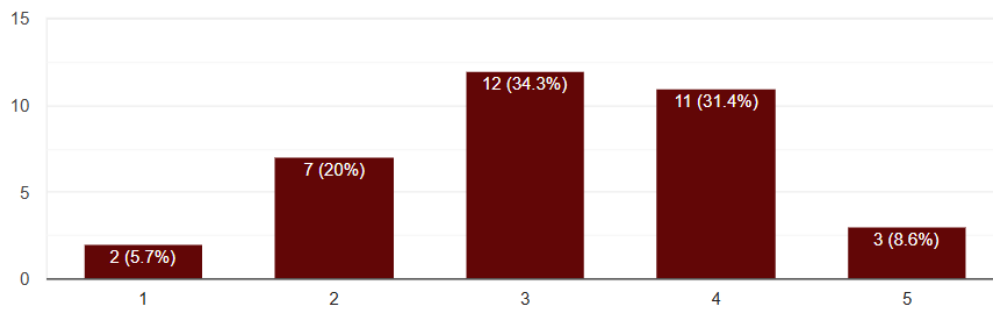
Grafik 9. Frekuensi Responden Merasa Penting Mengetahui Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kehidupan Masyarakat

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memberikan skor 1. Sebanyak 2,9% memilih skor 2. Hasil ini menunjukkan hanya sedikit responden yang merasa tidak penting untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebanyak 17,1% memilih skor 3. Hasil ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi netral. Di sisi lain, sebagian besar responden memberikan skor 4 (48,6%) dan 5 (31,4%). Hal ini menunjukkan bahwa, mayoritas responden merasa penting untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat.



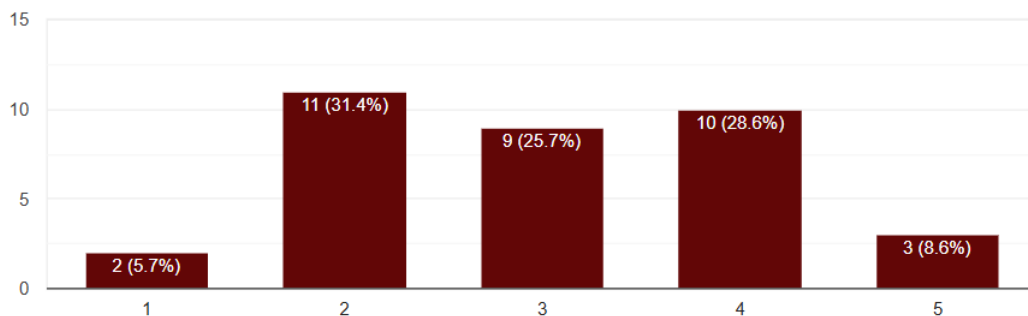
Grafik 10. Frekuensi Responden Merasa Tindakan Kecil di Media Sosial dapat Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memberikan skor 1. Sebanyak 11,4% memilih skor 2. Hal ini menunjukkan hanya sedikit responden yang tidak setuju bahwa tindakan kecil di media sosial dapat meningkatkan kesadaran politik. Sebanyak 14,3% memilih skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi netral. Di sisi lain, sebagian besar responden memberikan skor 4 (48,6%) dan 5 (25,7%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa tindakan kecil di media sosial seperti memberikan *like* dan komentar dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat.



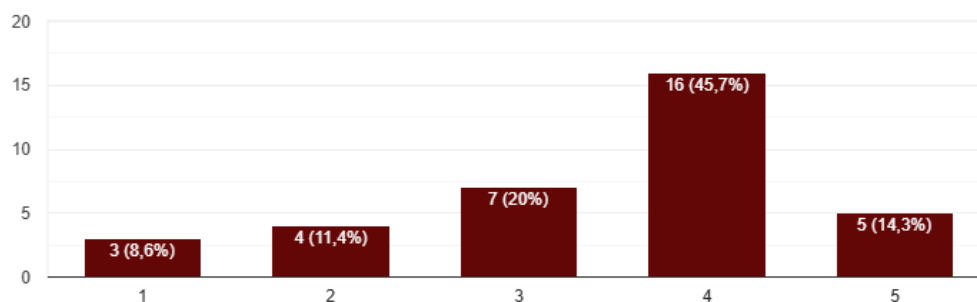
Grafik 11. Tingkat Inspirasi Berpolitik dari Konten Tokoh/*Influencer* di Media Sosial

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa hanya 5,7% responden yang memilih skor 1. Hasil ini menandakan bahwa hanya sedikit responden yang merasa tidak terinspirasi setelah melihat konten peduli politik. Sebanyak 20% responden memilih skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden merasa kurang terinspirasi untuk peduli politik setelah melihat konten dari tokoh atau *influencer*. Mayoritas responden sebesar 34,3% memilih skor 3. Hasil ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi netral terkait pengaruh konten tokoh atau *influencer* terhadap kepedulian mereka terhadap politik. Sementara itu, 31,4% responden memilih skor 4 dan 8,6% memilih skor 5. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian responden merasa terinspirasi untuk peduli politik setelah melihat konten yang dibagikan oleh tokoh atau *influencer* di media sosial.



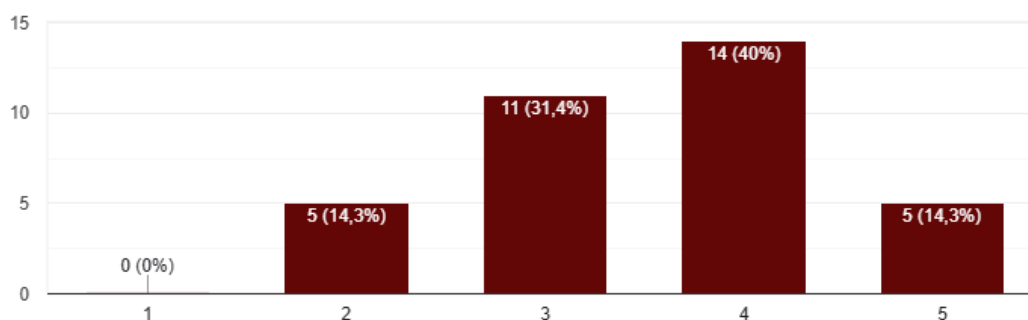
Grafik 12. Pengaruh Diskusi Teman Sebaya terhadap Dorongan untuk Berdiskusi Isu Politik di Media Sosial

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa hanya 5,7% responden yang memberikan skor 1. Mayoritas responden (31,4%) memilih skor 2. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian responden merasa kurang terdorong untuk ikut berdiskusi meskipun teman sebaya membicarakan isu politik. Sebanyak 25,7% responden memilih skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi netral terhadap pengaruh teman sebaya dalam mendorong mereka ikut berdiskusi mengenai isu politik di media sosial. Di sisi lain, 28,6% responden memilih skor 4 dan 8,6% memilih skor 5, menunjukkan bahwa sebagian responden merasa tergerak untuk ikut berdiskusi ketika melihat teman sebaya mereka membahas isu politik, baik pada tingkat setuju maupun sangat setuju.



Grafik 13. Frekuensi Ketakutan Responden untuk Terlibat dalam Diskusi Politik di Media Sosial Karena Bisa Menimbulkan Perdebatan

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 8,6% responden memberikan skor 1 dan 11,4% memberikan skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden merasa tidak memiliki ketakutan atau kekhawatiran untuk berdiskusi politik secara daring. Sebanyak 20% responden memberikan skor 3. Hal ini menandakan bahwa mereka tidak sepenuhnya takut, tetapi juga tidak sepenuhnya nyaman untuk terlibat dalam diskusi politik di media sosial. Mayoritas responden memberikan skor 4 (45,7%) dan skor 5 (14,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa takut untuk terlibat dalam diskusi politik secara daring.



Grafik 14. Frekuensi Minat dan Ketersediaan Waktu Pengguna untuk Mengikuti Isu Perkembangan Politik *Online*

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memberikan skor 1. Hal ini menandakan bahwa seluruh responden memiliki setidaknya sedikit waktu dan minat untuk mengikuti isu perkembangan politik di media sosial. Sebanyak 14,3% responden memberikan skor 2. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden yang tidak mengalami keterbatasan waktu dan minat dalam mengikuti perkembangan politik *online*. Sebanyak 31,4% responden memberikan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi netral antara memiliki waktu dan minat yang cukup atau merasa terbatas. Mayoritas responden memberikan skor 4 (40%) dengan tambahan 14,3% memberikan skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki keterbatasan waktu dan minat untuk mengikuti perkembangan politik di media sosial.

Pembahasan

Secara umum, hasil kuesioner menunjukkan bahwa Gen Z cukup sering terpapar konten politik di media sosial, terlihat dari tingginya proporsi responden yang memberikan skor 4 dan 5 pada indikator frekuensi melihat konten politik. Namun, paparan ini tidak diikuti dengan kebiasaan mengikuti akun atau *influencer* politik. Karena sebagian besar responden justru memberikan skor rendah pada indikator tersebut. Artinya, mereka melihat konten politik bukan karena mengikuti sumber politik tertentu, melainkan kemungkinan besar melalui algoritma media sosial. Meskipun demikian, mayoritas responden menganggap media sosial sebagai sumber utama informasi politik mereka. Pada indikator waktu yang dihabiskan untuk membaca atau menonton konten politik, sebagian besar responden berada pada kategori rendah hingga netral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsumsi politik Gen Z bersifat cepat dan sekilas, lebih bergantung pada paparan pasif daripada pencarian informasi secara aktif.

Media sosial memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pola partisipasi politik Gen Z. Meskipun mayoritas memiliki kebiasaan memeriksa kebenaran informasi, sebagian besar responden mengaku mengalami kesulitan dalam membedakan informasi politik yang benar dan hoaks. Selain itu, komentar pengguna lain turut memengaruhi cara mereka menilai isu politik. Hal tersebut menandakan bahwa interaksi sosial di media sosial berperan dalam membentuk opini politik mereka. Secara keseluruhan, media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga memengaruhi proses pembentukan sikap politik Gen Z.

Keterlibatan politik Gen Z di media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong terlihat dari tingginya kesadaran responden mengenai pentingnya memahami isu politik dan kebijakan pemerintah. Mayoritas responden meyakini bahwa tindakan kecil seperti *like*, komentar, atau berbagi konten dapat meningkatkan kesadaran politik, dan sebagian merasa terinspirasi oleh konten tokoh atau *influencer*. Diskusi dengan teman sebaya turut memberikan dorongan tambahan bagi sebagian kecil responden untuk terlibat dalam percakapan politik. Di sisi lain, hambatan utama dalam keterlibatan politik Gen Z adalah rasa takut untuk ikut berdiskusi politik secara terbuka di media sosial. Selain itu, keterbatasan waktu dan minat juga menjadi penghambat, karena banyak responden merasa tidak selalu memiliki cukup perhatian untuk mengikuti perkembangan politik secara rutin.

Berdasarkan teori Achmad & Dwimawanti, media sosial telah bertransformasi dari sekadar sarana hiburan menjadi arena komunikasi politik yang non-hierarkis, interaktif, dan mudah diakses, khususnya bagi Generasi Z. Hasil jawaban pada pernyataan “Saya sering melihat konten atau berita politik Indonesia di media sosial” mendukung teori tersebut. Mayoritas responden memberikan skor 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa responden sering melihat konten atau berita politik Indonesia di media sosial. Sesuai dengan teori Achmad & Dwimawanti, kemudahan akses pada informasi politik memungkinkan Gen Z untuk sering melihat konten atau berita politik.

Selain itu, jawaban dari pernyataan “Media sosial menjadi sumber utama saya untuk mengetahui kondisi politik di Indonesia” mendukung teori dari Achmad & Dwimawanti. Dengan tingginya persentase pada skor 4 dan 5, menunjukkan kuatnya ketergantungan Gen Z pada media sosial untuk memperoleh informasi politik. Temuan ini memperkuat teori bahwa media sosial berperan signifikan dalam mempermudah akses informasi politik

dan membentuk kebiasaan konsumsi informasi politik dalam kehidupan sehari-hari.

Khatimah menyatakan bahwa arus disinformasi yang didorong algoritma dapat membentuk *echo chamber*. Akibatnya adalah pengguna media sosial berpotensi lebih tinggi untuk menerima konten atau berita yang kurang kredibel. Hal ini akan membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi politik yang benar. Teori ini terbukti dalam hasil jawaban responden dalam pernyataan “Saya merasa sulit membedakan antara informasi politik yang benar dan hoaks di media sosial”. Sebagian besar responden yang memberikan skor 4 (34,3%) dan 5 (14,3%) menunjukkan adanya kesulitan dalam memilah informasi valid dari hoaks. Selain itu, tidak ada responden yang memberikan skor 1, menandakan bahwa tidak ada responden yang merasa mudah untuk membedakan informasi yang benar dan hoax di media sosial. Secara keseluruhan, hasil kuesioner ini sejalan dengan teori oleh Khatimah, bahwa situasi ini dapat menurunkan kualitas diskusi publik sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap disinformasi.

Jawaban kuesioner pada pernyataan “Saya memeriksa kebenaran berita politik yang saya lihat di media sosial sebelum mempercayainya” memperkuat teori dari Khatimah. Hasilnya adalah mayoritas responden memberikan skor 4 (51,4%) dan 5 (28,6%) yang menunjukkan bahwa mereka cenderung memeriksa kebenaran informasi politik sebelum mempercayainya. Tidak adanya responden yang memberi skor 1 dan 2 menegaskan bahwa tidak ada yang menolak pentingnya verifikasi informasi. Sikap ini dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi media sosial yang ambivalen sebagaimana dijelaskan oleh Khatimah.

Berdasarkan Khatimah, media sosial memiliki peran dalam memperkuat polarisasi politik karena algoritma platform cenderung menciptakan *echo chamber*. Jawaban responden pada pernyataan “Pendapat atau komentar pengguna lain di media sosial memengaruhi cara saya menilai isu politik” mencerminkan teori Khatimah tentang *echo chamber*. Sebanyak 48,6% responden memberikan skor 4 dan 5,7% memberikan skor 5. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan pengaruh komentar pengguna lain terhadap penilaian mereka tentang isu politik. Temuan ini menegaskan bahwa opini politik tidak sepenuhnya terbentuk secara individual, melainkan dipengaruhi oleh pandangan dan respons yang mereka temui di media sosial.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik memengaruhi proses pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik akan memberikan dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Jawaban responden pada pernyataan kuesioner “Saya merasa perlu memahami isu-isu politik agar bisa mengambil keputusan yang tepat sebagai warga negara” mendukung pandangan ini. Dominasi skor 4 dan 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa penting memahami isu politik sebelum mengambil keputusan sebagai warga negara. Pemahaman tersebut menjadi pondasi penting karena keputusan warga akan memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, keputusan setiap individu turut memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi negara, sehingga tingginya persentase responden yang setuju mencerminkan kesiapan dan kesadaran partisipatif yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi.

Pernyataan “Saya merasa penting untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat” juga mendukung pandangan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Hal ini terlihat dari mayoritas skor 4 dan 5 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa penting mengetahui kebijakan pemerintah yang memengaruhi

kehidupan masyarakat, serta sangat sedikit yang tidak setuju. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden tidak hanya menyadari peran mereka sebagai warga negara, tetapi juga memahami bahwa informasi mengenai kebijakan pemerintah menjadi landasan bagi keterlibatan politik yang lebih bermakna dalam sistem demokrasi.

Pernyataan mengenai keyakinan bahwa tindakan kecil di media sosial dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat juga sejalan dengan pandangan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Dominasi skor 4 (48,6%) dan 5 (25,7%) menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat interaksi sederhana seperti like, komentar, atau membagikan konten sebagai bentuk partisipasi yang turut meningkatkan kesadaran politik publik. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi politik tidak harus berupa tindakan besar dan formal, tindakan kecil yang dilakukan secara sadar di ruang digital juga dapat mencerminkan keterlibatan warga negara dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Milbrath menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah situasi lingkungan politik. Situasi kondusif dapat mendukung berjalannya kegiatan politik, sedangkan situasi tidak kondusif dapat membuat individu merasa ragu untuk berpartisipasi. Hasil jawaban responden terhadap pernyataan “Saya takut terlibat diskusi politik di media sosial karena bisa menimbulkan perdebatan” sejalan dengan teori Milbrath. Sebanyak 45,7% responden memberikan poin 4 dan 14,3% memberikan poin 5. Temuan ini merepresentasikan bahwa responden memandang situasi politik tidak aman, khususnya dalam media sosial. Persepsi tersebut menghambat mereka untuk terlibat dalam aktivitas politik. Rasa takut akan potensi perdebatan politik di media sosial menyebabkan rendahnya partisipasi politik, sebagaimana disebutkan oleh Milbrath.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen Z cukup sering terpapar konten politik di media sosial, namun konsumsi tersebut bersifat pasif dan bergantung pada algoritma. Media sosial dijadikan sumber utama informasi politik oleh Gen Z. Tetapi waktu yang mereka habiskan untuk mendalami isu politik relatif rendah. Selain itu, interaksi sosial seperti komentar pengguna lain turut membentuk opini mereka. Kemampuan Gen Z untuk memvalidasi informasi masih menjadi tantangan. Pengguna media sosial disarankan untuk memperkuat literasi digital dengan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum menerima atau membagikannya. Langkah ini dapat dilakukan dengan membandingkan informasi yang diterima dengan sumber terpercaya dan mengenali ciri-ciri berita palsu. Keterlibatan politik Gen Z di media sosial dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong dan penghambat. Kesadaran akan pentingnya isu politik, keyakinan bahwa aktivitas sederhana di media sosial dapat berdampak, serta tindakan dari tokoh atau influencer menjadi faktor pendorong utama. Namun, keterlibatan mereka masih dibatasi oleh rasa takut untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, serta keterbatasan waktu dan minat untuk mengikuti perkembangan politik secara konsisten.

Gen Z disarankan untuk mulai mengikuti akun atau sumber informasi politik yang terpercaya, seperti akun resmi institusi pemerintah dan jurnalis kredibel. Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima tidak hanya bergantung pada algoritma media sosial semata. Pemerintah dapat membuat program edukasi literasi digital, khususnya di bidang politik ke sekolah, kampus, atau organisasi yang didominasi Gen Z. Tujuannya adalah untuk melindungi pengguna media sosial dari berita hoaks yang berpotensi menimbulkan

perdebatan. Ketakutan Gen Z untuk berdiskusi menunjukkan perlunya kebijakan yang melindungi kebebasan berpendapat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengurangi perundungan akibat perbedaan pendapat dalam diskusi politik dan intimidasi digital. Tujuannya agar pengguna media sosial, terutama Gen Z, dapat lebih aktif dalam diskusi tanpa rasa takut atau tekanan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terutama dari sisi ukuran sampel yang terbatas. Selain itu, penelitian hanya menggunakan metode kuesioner sehingga tidak dapat menangkap dinamika interaksi politik digital secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas serta menggabungkan metode kualitatif seperti wawancara atau analisis konten media sosial. Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi peran algoritma secara lebih spesifik dan bagaimana interaksi sosial digital memengaruhi pembentukan sikap politik Gen Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F., & Hayu Dwimawanti, I. (2024). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z DALAM PEMILU 2024 DI JAWA TENGAH. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 975-990. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49755>
- Agustin, D. (2024). Peran komunikasi dalam meningkatkan partisipasi politik melalui media sosial di kalangan pemilih pemula. *Circle Archive*, 1(6). <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JUPENDIS/article/view/1593/1469>
- Amrullah, M., Perkasa, D. H., & Edward, R. (2025). Gen Z and the Future of Work: Adapting HRM Strategies for A Digital Workforce. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(3), 1835–1843. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3.4053>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Arsyad Arsyad, Rifma Ghulam Dzaljad, Mia Nurmiarani, & Safutra Rantona. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 2(2), 240–251. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1593>
- Az Zahra, F., & Pratiwi, I. E. (2025, September 4). Mengenal Gen Z dari aksi demo 2025: Kritis, estetik, bertahan dengan humor. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/04/151500465/mengenal-gen-z-dari-aksi-demo-2025--kritis-estetik-bertahan-dengan-humor>
- Bajari, A. H., & Morin, J. P. H. (2025). Pengaruh konten digital terhadap partisipasi politik: Kajian literatur tentang aktivisme media sosial. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 30–41. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/1005/1048>
- Cipta, A. (2025, September 5). Influencer vs DPR: Aksi nyata 17+8 tuntutan rakyat di era digital. *Yousay.id*. <https://yoursay.suara.com/kolom/2025/09/05/093907/influencer-vs-dpr-aksi-nyata-178-tuntutan-rakyat-di-era-digital>
- Dianira, F. (2025, September 4). Ramai 17+8 Tuntutan Rakyat di Medsos, ini arti dan isi lengkapnya. *Detik Bali*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-8095817/ramai-17-8-tuntutan-rakyat-di-medsos-ini-arti-dan-isi-lengkapnya>
- Husniati, N., & Bik, M. T. N. (2025). Media sosial dan transformasi komunikasi politik. *Berugak Jurnal UIN Mataram*.
- Jayawinangun, R., & Nugroho, D. R. (2025). Pengaruh media digital, kesadaran, dan pengetahuan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*,

- 29(1), 16-28. <https://doi.org/10.56873/jskm.2025.5885>
- Khatimah, K., et al. (2024). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia. *VOX POPULI*, 7(2).
- Margaretta, Sophia. (2025, April 30). Media Sosial Menjadi Platform Komunikasi Modern Di Era Digital. Telkom University. <https://mcomms.telkomuniversity.ac.id/s2-ilmu-komunikasi-media-sosial-platform-komunikasi-modern/>
- Natalia, D., Sasmita, F., & Ahmad, M. R. S. (2025). Partisipasi politik Generasi Z: Peran media sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15772–15778. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28067>
- ResearchGate. (2023). Generation Z – A New Lifeline: A Systematic Literature Review. *European Scientific Journal*, 19(25), 1-13.
- Rosyidah, N., & Haniifah, N. (2025). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Gen Z Studi Kasus. *Pubmedia Journal Series*, 2(2), 52–61.
- Suhardi, A. J. (2019, Mei 21). Cara Bijak Mewujudkan Partisipasi Politik. Pemerintah Kabupaten Natuna. <https://natunakab.go.id/cara-bijak-mewujudkan-partisipasi-politik/>
- United Nations. (n.d.). Goal 16: Peace, justice and strong institutions. United Nations. Retrieved October 2, 2025, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/>

LAMPIRAN

Link Google Drive yang berisi hasil Turnitin, proposal kegiatan, dokumentasi, dan pertanyaan kuesioner: CB Agama - Kelompok 8